

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Yuanita Utami¹, M.B. Zubakhrum Tjenreng²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : yuanitautami.kaa@gmail.com¹, zubakhrum@gmail.com²

ABSTRACT

The implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in regional governments throughout Indonesia is a mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, in articles 391 and 392 which essentially require regional governments to provide regional government information through the regional government information system. In order to strengthen the process of developing transparent and accountable regional governments, including the planning, management, and reporting processes of regional government administration, SIPD is published as a general application in the field of regional government that must be implemented in each regional government. The dynamics of this implementation are interesting to study because the capacity and resources owned by regional governments are not the same and evenly distributed. This study focuses on the effectiveness of the implementation of SIPD in regional governments in Indonesia and the factors inhibiting the effectiveness of its implementation. The purpose of this study is to review various scientific articles related to the effectiveness of the implementation of SIPD in regional governments in Indonesia and to explore the factors inhibiting the effectiveness of its implementation. This study uses a literature study of scientific articles in journals and proceedings in the last 2 years. A total of 20 articles that were collected and analyzed proved that based on Duncan's theory, the effectiveness of services in the components of goal achievement and integration has been implemented well, but the adaptation component has not been considered effective. This is because the factors inhibiting the effectiveness of its implementation are related to the implementer's minimal understanding of how to operate the application, limited provision of facilities and infrastructure, and low leadership commitment.

Keywords: *Regional Government Information System (SIPD), E-Government, Effectiveness.*

ABSTRAK

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pemerintahan daerah di seluruh Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 391 dan 392 yang intinya mewajibkan pemerintahan daerah untuk menyediakan informasi

pemerintahan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah. Dalam rangka penguatan proses pembangunan pemerintahan daerah yang transparan serta akuntabel, meliputi proses perencanaan, pengelolaan, serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, SIPD diterbitkan sebagai aplikasi umum bidang pemerintahan daerah yang wajib diterapkan di masing-masing pemerintahan daerah. Dinamika penerapan ini menarik untuk dikaji karena kapasitas serta sumber daya yang dimiliki pemerintahan daerah tidak sama dan merata. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan SIPD di pemerintahan daerah di Indonesia dan faktor penghambat efektivitas penerapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai artikel ilmiah terkait efektivitas penerapan SIPD di pemerintahan daerah di Indonesia serta menggali faktor penghambat efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan studi literatur terhadap artikel ilmiah pada jurnal dan prosiding 2 tahun terakhir. Sebanyak 20 artikel yang dikumpulkan dan dianalisis membuktikan bahwa berdasarkan teori Duncan, efektivitas pelayanan pada komponen pencapaian tujuan dan integrasi telah diterapkan secara baik, tetapi pada komponen adaptasi belum dinilai efektif. Hal tersebut karena faktor penghambat efektivitas penerapannya yaitu terkait minimnya pemahaman pelaksana terhadap pengoperasian aplikasi, keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana, serta rendahnya komitmen pimpinan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, *E-Government*, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam sektor pemerintahannya, terutama karena penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Digitalisasi mengubah pemerintah dan hubungan masyarakat. Perubahan ini terjadi ketika pemerintah Indonesia menyadari pentingnya teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik pada awal tahun 2000-an. Digitalisasi pemerintahan dimulai dengan berbagai program, seperti Sistem Administrasi Badan Hukum, *e-government*, dan *e-procurement*. Tujuan

dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi birokrasi yang rumit dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran publik.

Selain itu, pemerintah meluncurkan program *e-government* yang lebih terorganisasi pada 2014. Salah satu tujuan dari *e-government* adalah untuk menggabungkan sistem informasi yang ada di berbagai lembaga pemerintahan untuk mempermudah akses dan pengelolaan data. Adanya situs *web* dan aplikasi *mobile* resmi membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemerintah. Misalnya, aplikasi *Lapor.go.id* meningkatkan

partisipasi publik dengan memungkinkan warga melaporkan masalah langsung kepada pemerintah.

Penggunaan teknologi semakin giat dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Cloud computing*, *big data*, dan *Internet of Things* (IoT) adalah beberapa teknologi canggih yang pemerintah mulai menggunakan. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, contohnya, telah menjadi kota pintar dalam manajemen pelayanan publik. Tujuan dari konsep ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi layanan publik melalui pemanfaatan data dan teknologi.

Inovasi dalam pelayanan publik menjadi sangat penting bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat. Ini bukan hanya penggunaan teknologi, ini mengubah budaya, proses, dan cara pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik pemerintah Indonesia telah membawa banyak inovasi. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah pengembangan aplikasi "SIPD" (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang merupakan platform inovatif untuk melaporkan masalah kepada pemerintah yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik langsung tentang layanan publik, menemukan masalah, dan

berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan.

Warga dapat mengajukan permohonan layanan seperti perizinan melalui aplikasi berbasis *mobile*, mengurangi kebutuhan akan pertemuan langsung yang sering memakan waktu dan tenaga. Ini menjadi salah satu langkah yang berhasil untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efektif. Pendekatan berbasis masyarakat juga digunakan untuk melihat inovasi dalam pelayanan publik. Pemerintahan Terbuka atau program "*Open Government*" mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah mendorong partisipasi publik dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan melalui forum diskusi online, konsultasi publik, dan survei. Masyarakat merasa lebih dihargai dan memiliki lebih banyak suara dalam proses pemerintahan. Salah satu komponen penting dari inovasi pelayanan adalah penggunaan teknologi canggih seperti analitik data dan kecerdasan buatan (*AI*). Misalnya, *chatbot* di situs web resmi pemerintah memungkinkan orang mengakses informasi dengan cepat tanpa menunggu jawaban dari pejabat. Analitik data juga membantu pemerintah memprediksi dan membuat layanan yang lebih baik.

Selain itu, beberapa daerah di Indonesia telah memulai program inovasi dalam pelayanan publik yang memanfaatkan kearifan lokal dan inovasi. Inisiatif seperti "*smart city*" sedang berkembang di kota-kota besar yang menggabungkan teknologi dengan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Upaya ini mencakup sistem transportasi umum yang terintegrasi, lampu lalu lintas yang pintar, dan sensor untuk mengelola sampah.

Pada sektor perencanaan, pengelolaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di pemerintahan daerah, diterapkan SIPD untuk digunakan oleh seluruh pemerintahan daerah. SIPD bukan produk aplikasi baru. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2020. Namun, pemerintah meluncurkan SIPD sebagai aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 12 Desember 2023.

Pemerintahan daerah pada 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota (sumber: www.bps.go.id), akan terhubung dalam aplikasi umum ini dengan harapan efektivitas penyelenggaraan pembangunan dapat terwujud. Dalam perspektif ekonomi, penggunaan aplikasi umum dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan aplikasi sejenis yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dalam Berita Online Republika.co.id tanggal 12 Juli 2022 bahwa terdapat 400.000 aplikasi yang membutuhkan pembiayaan secara rutin tiap tahunnya, sementara menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejumlah 24.400 aplikasi pemerintah yang berhasil diidentifikasi akan dipangkas dan digantikan dengan delapan aplikasi umum. Selain itu, pusat data dan server sejumlah 2700 menyulitkan untuk menyatukan data pemerintahan, sehingga akan dibuat Pusat Data Nasional yang akan dikendalikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi.

Aplikasi SIPD adalah *platform* yang digunakan oleh pemerintahan daerah di Indonesia untuk mengelola dan memantau pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Beberapa fungsi utama SIPD yaitu menyediakan sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data terkait dengan pembangunan daerah, termasuk anggaran, program, dan kegiatan pembangunan, menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien dan transparan, serta mengintegrasikan berbagai sumber daya, memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga

pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efektivitas program. Selain itu, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, serta memfasilitasi koordinasi antar berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan. Aplikasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan SIPD di Indonesia melalui studi literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan lokus yang berasal dari beberapa pemerintahan daerah di Indonesia. Pembahasan ini menarik bagi peneliti karena aplikasi umum SIPD menjadi aplikasi yang tengah gencar diterapkan di pemerintahan daerah dengan konsep integrasi, tidak dibuat oleh masing-masing, diterapkan dalam kerangka SPBE terhadap pemerintahan daerah dalam kondisi ketersediaan sumber daya yang beragam.

TINJAUAN PUSTAKA

Fokus utama penggunaan teknologi dalam pemerintahan adalah kepentingan

rakyat atau warga negara. *E-government is the use of information technology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenient, customer-oriented, cost-effective, and altogether different and better way* (Holmes, 2001). *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk memberikan pelayanan publik yang jauh lebih nyaman, berorientasi pelanggan, hemat biaya, dan sama sekali berbeda dan cara yang lebih baik.

Electronic Government adalah penggunaan teknologi, tidak hanya teknologi informasi tetapi juga teknologi komunikasi (TIK), sebagai sarana untuk meningkatkan administrasi dan penyediaan layanan publik (Bell, 2004). Hadirnya internet juga membuka peluang pemerintah untuk melakukan ‘revolusi’ dan restrukturisasi organisasi. Dengan menggunakan TIK, maka *government institutions and procedures could be re-engineered to produce new network organizational forms which are more cost effective and should also adopt a customer-oriented approach to service delivery* (Bell, 2004). Institusi dan prosedur pemerintah dapat direkayasa ulang untuk menghasilkan bentuk organisasi jaringan baru yang lebih efektif dari sisi pembiayaan dan juga harus mengadopsi pendekatan yang berorientasi

pada pelanggan untuk penyediaan berbagai jenis layanan publik.

Fokus pemerintahan elektronik tetap pada perbaikan pelayanan terhadap warga negara. Teknologi hanya satu alat untuk membantu perbaikan dalam pelayanan tersebut. Pemerintahan elektronik fokusnya bukan pada kata 'elektronik' atau teknologinya tetapi tetap pada pemerintahannya. *The fact to remember is that the emphasis in e-government should be on the 'government' and non on 'e'. E-government is 'government', not technology* (Jeong, 2006). Fakta yang perlu diingat adalah bahwa penekanan dalam *e-government* harus pada 'pemerintahan' dan bukan pada 'e'. *E-government* adalah 'pemerintah', bukan teknologi.

Penerapan *e-government* juga akan memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Berdampak pada hubungan antara institusi (unit administrasi pemerintah) dengan warga, kalangan dunia usaha, dan lembaga-lembaga publik lainnya, serta proses bisnis internal dan karyawan dalam satu organisasi maupun antarorganisasi. Gerakan *e-government* sejatinya juga didorong oleh kebutuhan pemerintah untuk memenuhi adanya perubahan di lingkungan pemerintahan. Ada tiga dorongan yang sekaligus menjadi manfaat yang diharapkan, yaitu *cut cost and improve efficiency, meet citizen*

expectations and improve citizen relationships, and facilitate economic development (Holmes, 2001). Penerapan *e-government* didorong oleh kebutuhan pemerintah untuk memotong biaya dan meningkatkan efisiensi, menemui/memenuhi ekspektasi warga dan meningkatkan hubungan antarwarga negara, serta memfasilitasi pembangunan ekonomi. Penerapan TIK dalam pemerintahan yang ditangani secara profesional tidak bisa ditunda-tunda lagi. Berdasarkan pendapat ahli tersebut bahwa dampak penerapan *e-government* tersebut adalah pencapaian tujuan pemerintahan secara cepat dan tepat. Ketepatan sasaran atau tujuan tersebut disebut efektivitas.

Menurut Gibson, efektivitas adalah tercapainya tujuan dan sasaran yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama (Gibson, 2001). Tingkat tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat efektivitas. Apabila tujuan dan sasaran tercapai sesuai rencana maka dapat dikatakan efektif. Jika tujuan dan sasaran ini tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif.

Pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam bukunya Manajemen Umum di Indonesia yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *"Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An*

effective manager is one who selects the right things to get done". (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil yang sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan) (Moenir, 2006).

Efektivitas pelayanan menurut Duncan dalam Ismaya dkk., menyatakan adanya beberapa komponen sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan. Jangka waktu pencapaian, sasaran, dan landasan hukum semuanya dapat dijadikan sebagai penanda keberhasilan suatu tujuan. Dalam hal jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, khususnya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tanpa melewati standar pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan apakah SOP tersebut terpenuhi atau tidak.
2. Integrasi. Integrasi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu prosedur dan proses sosial. Prosedur adalah langkah-langkah penyelesaian suatu kegiatan, sedangkan proses sosial adalah sarana yang menghubungkan orang dan kelompok dan bagaimana mereka berinteraksi untuk

membentuk sistem tertentu.

3. Adaptasi. Sarana dan prasarana adalah dua indikasi utama adaptasi, dan peningkatan kapasitas adalah upaya untuk meningkatkan derajat, level, dan kualitas di samping kuantitas. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas digunakan sebagai alat langsung dan tidak langsung untuk menyelesaikan suatu tugas¹.

Dengan demikian, tiga dimensi yang disebutkan Duncan sebagai komponen efektivitas layanan tadi akan penulis jadikan sebagai pisau analisis untuk melihat penerapan SIPD dari daerah satu dengan daerah lainnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur. Data yang dikumpulkan dari berbagai jurnal di seluruh dunia dirangkum berdasarkan pengalaman penulis, teori, dan model yang ada. Danial dan Warsiah mendefinisikan studi literatur sebagai jenis penelitian di mana informasi dikumpulkan dari berbagai buku, majalah, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan subjek dan tujuan penelitian (Rahman & Selviyanti, 2018). Metode ini digunakan untuk mengungkapkan berbagai teori yang

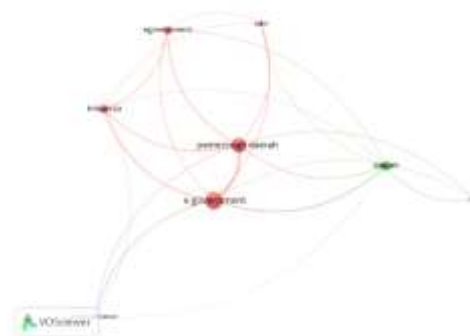
¹ N. Ismaya dan Mustafa & Jopang, *Kualitas Pelayanan Publik*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hal. 42.

terkait dengan masalah yang diteliti atau dibahas. Teori-teori ini juga digunakan sebagai referensi saat berbicara tentang hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan, yaitu pada bulan Desember 2024. Zed menyatakan bahwa studi literatur menggunakan data perpustakaan tanpa memerlukan penelitian yang mengharuskan peneliti ke lapangan (M. Zed, 2014).

Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono, data atau sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2022). Data sekunder diperoleh dari berbagai pihak lain sehingga peneliti hanya perlu memindahkan atau menganalisis kembali hasil penelitian yang ditemukan (Sidiq & Choiri, 2019). Data sekunder yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah dari berbagai jurnal dan prosiding nasional dua tahun terakhir yakni 2004 s.d. 2005. Kurun waktu penarikan penelitian dalam dua tahun terakhir atas pertimbangan aplikasi SIPD dalam kerangka penerapan SPBE baru diluncurkan pada akhir tahun 2023 karena tentu terdapat perbedaan dengan SIPD sebelumnya yang belum terintegrasi. Di dalam penelitian ini, artikel ilmiah yang dianalisis sebanyak 20 artikel.

Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Menurut Sidiq & Choiri, teknik dokumentasi adalah teknik pencarian data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya untuk ditelaah secara mendalam (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam penelitian ini peneliti mencari jurnal penelitian yang dipublikasikan di internet dengan menggunakan *Google Scholar* melalui *Publish or Perish* dengan judul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Terdapat 62 hasil pencarian dengan visualisasi hasil olah Vosviewer sebagai berikut:



Sumber: Vosviewer, data diolah oleh peneliti (2025)

Gambar 1. Hasil Olah Data Vosviewer

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa SIPD erat kaitannya dengan pembahasan *e-government*, pemerintahan daerah, dan implementasi SPBE. Untuk menjawab masalah penelitian, data sekunder dengan poin yang sama dari setiap jurnal rujukan dikumpulkan dan

dibandingkan dan dianalisis. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis isi. Sidiq & Choiri menyatakan bahwa penelusuran teks dalam teknik analisis isi meninjau kajian teori, metodologi, dan sumber kepustakaan tersebut sebagai bahan kajiannya (Sidiq & Choiri, 2019). Uraian yang dihasilkan dari teknik analisis data adalah pembahasan mendalam ataupun kesimpulan dari isi bahan tertulis yang dianalisis berdasarkan teori efektivitas Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hasil Analisis Artikel Ilmiah

Kode	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
A1	Nathan Gilbert Ayomi	Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintah	SIPD berperan penting sebagai sarana untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan

		ahan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua	keputusan dan evaluasi pemerintahan daerah adalah akurat, relevan, transparan, dan akuntabel. Namun, terdapat faktor penghambat yaitu penyesuaian dengan perubahan mekanisme penganggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan praktik di lapangan. Proses penatausa
--	--	---	---

			<p>haan dan pelaporan juga menjadi kendala dalam penggunaan SIPD di lapangan. Tantangan ini menyoroti perlunya adaptasi yang lebih baik antara sistem yang diterapkan dan praktik yang ada, termasuk peningkatan pemahaman dan dukungan dari pihak terkait untuk</p>
--	--	--	--

			<p>memaksimalkan potensi SIPD sebagai alat manajemen keuangan yang efektif (Ayomi, 2024).</p>
A2	Aufalansy Alani	<p>Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Aplikasi Akuntansi dalam Proses Akuntansi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (Studi Kasus pada BPKAD Provinsi Sumatera</p>	<p>Keunggulan dari aplikasi SIPD yaitu efektif dan efisien, update sesuai regulasi, keamanan, kejelasan, dan transparansi. Kendala yang sering</p>

		Barat)	dihadapi dalam penerapan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) pada Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Barat yaitu jaringan internet yang bermasalah, laptop/PC yang tiba-tiba <i>error</i> , dan pengguna yang kurang teliti dalam menginput data
--	--	--------	---

			(Alani, 2024).
A3	Friezka Pratami	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III, terdapat 4 (empat) indikator penting yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi. Melalui variabel-variabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIPD cukup berhasil diselenggarakan di BPKAD Provinsi Sumbar memenuhi variabel yakni komunikasi, sumber daya,

			disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam implementasi aplikasi SIPD, BPKAD Provinsi Sumatera Barat mengalami tiga hambatan. Pertama, server dan jaringan yang tidak kuat atau lemah. Kedua, belum tersedianya fitur untuk aset lain-lain. Ketiga, masih terjadinya data yang tidak terintegra
--	--	--	---

			si yakni tidak tertariknya data (Pratami, 2024).
A4	Nur Asmawati, Suparman, Hendra Gunawan	Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat	Implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat sudah diterapkan dengan baik, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk memastikan

			keberlanjutan implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah dengan tetap melakukan koordinasi antar dinas terkait untuk memastikan SIPD berjalan dengan lancar. Adapun kendala yang dihadapi yaitu peningkatan Sumber Daya
--	--	--	---

			Manusia dan masih belum adanya SOP terkait SIPD (Asmawati et al., 2024).
A5	Lenny Mariana	Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward Edward III, implementasi aplikasi SIPD berhasil diselenggarakan di BPKAD Kota Bekasi memenuhi variabel yakni komunikasi, sumber

			<p>daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun hambatan penerapannya meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terampil karena Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pengembang aplikasi serta masalah teknis dalam seperti</p>
--	--	--	---

			<p>aplikasi yang sulit untuk diakses karena permasalahan jaringan, infrastruktur, serta fitur menu pada aplikasi yang belum lengkap juga menjadi salah satu kendala (Mariana, 2024).</p>
A6	Nanda Yoga Aditiya, Popy Dian Indira Kusuma	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah	Hasil dari analisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada

		ah Kecamat an Sumbang Kabupat en Banyum as	Pemerinta h Kecamata n Sumbang Kabupate n Banyuma s dari ke empat indikator dalam teori Edward III sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan signifikan . Hambatan yang terjadi sendiri dipengaru hi oleh aplikasi yang sering mengala
--	--	---	--

			mi kendala <i>error</i> dan <i>traffic</i> <i>system</i> (Aditiya et al., 2024).
A7	Sukmawa ty, Gunawan, Muhamm ad Yusuf	Impleme ntasi Sistem Informas i Pemerint ahan Daerah dalam Penyusu nan Rencana Kerja Pemerint ahan Daerah	Implemen tasi SIPD dalam penyusun an RKPD di Kabupate n Konawe telah melibatk an tiga aspek tata kelola operasion al, yaitu meningka tkan motivasi pegawai, meningka tkan fokus pada pelayanan , dan meningka

			<p>tkan koordinasi penyampaian layanan. Namun, implementasi SIPD tersebut belum optimal sesuai perspektif integritas (Sukmawaty, Gunawan, 2024).</p>
A8	<p>Rezki Zairullah Amroni1, Taufan2</p>	<p>Penerapan Pengawasan Terhadap Penerapan Aplikasi SIPD Di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<p>Proses komunikasi telah diterapkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan karena banyaknya</p>

		Selatan	<p>pemberitahuan informasi melalui berbagai media yang memiliki dedikasi, konsisten dan komitmen. Sumber daya yang dimiliki sudah cukup memadai guna menunjang pengaplikasian SIPD di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Disposisi dalam hal ini sikap</p>
--	--	---------	--

		<p>dan tingkah laku unjuk kerja para pelaksana masih tergolong rendah. Struktur Organisasi pelaksana SIPD merupakan Tim Pengelola SIPD, tetapi karena tidak memiliki komitmen para pimpinan yang dampak besar penerapan SIPD (Amroni & Taufan, 2024).</p>	<p>A9</p>	<p>Sheilla Destania</p>	<p>Evaluasi Kualitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun</p>	<p>Penerapan SIPD sudah baik secara akurasi data dan mudah untuk diakses namun terdapat catatan ketika dilakukan evaluasi melalui 3 indikator yaitu kualitas konten, kualitas layanan dan kualitas teknis. Terutama pada kendala jaringan dan <i>error system</i> (Destania,</p>
--	--	---	-----------	-------------------------	---	--

			2024).
A10	Muh. Nur Hidayat	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat	Penggunaan SIPD dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah efektif dan efisien, karena sangat membantu Pemerintahan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Namun dalam pelaksana

			annya masih terdapat hambatan seperti, kualitas dan kuantitas SDM pengelola SIPD, sistem yang terkadang bermasalah, serta jaringan telekomunikasi yang sering tidak stabil (Hidayat, 2024).
A11	Andoni Lazuardi, Gunariantono, Hartini Prasetyaning Pawestri	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Aplikasi Sistem	Berdasarkan kelima indikator, indikator pencapaian tujuan, integritas, pemahaman

		Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan	an program, dan perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program telah efektif, tetapi indikator adaptasi kurang efektif (Lazuardi & Pawestri, 2024).
A12	I Ketut Aditya Teken, Arina Romarina	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelola	Penerapan SIPD di BPKAD Kota Denpasar belum efektif dalam meningkatkan kinerja pengelola

		Keuangan Daerah Kota Denpasar	an keuangan daerah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penerapannya baru dilaksanakan tahun 2022 dan membutuhkan proses adaptasi bagi pengguna, kurangnya integrasi dengan data sistem keuangan sehingga membutuhkan aplikasi pendamping SIPKD untuk
--	--	-------------------------------	---

			penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan (AkLap), sistem sering mengalami <i>error</i> , lambatnya respon aplikasi, minimnya pelatihan dan sosialisasi bagi pengguna. Respon pemerintah pusat terhadap permasalahan teknis dan operasional yang dihadapi pemerintahan daerah dinilai
--	--	--	---

			sangat lambat (Teken & Romarina, 2024).
A13	Imam Subroto dan Beta Andri Anggiano Uliansyah	Evaluasi Perspektif Pengguna Terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten X)	Hasil analisis menggunakan model kesuksesan DeLone dan McLean juga menunjukkan hasil yang mendukung analisis SUS. Secara keseluruhan aplikasi ini belum memuaskan pengguna. Aspek yang mendapat nilai paling rendah adalah aspek

			<p>kualitas sistem informasi. Sementara aspek yang dinilai paling memuaskan adalah aspek kualitas layanan. Layanan berupa bimbingan teknis telah dilakukan oleh pengembangan SIPD, namun perlu dilakukan secara intensif terutama jika terdapat pemutakhiran sistem informasi (Subroto</p>
--	--	--	--

			& A. A. Uliansyah, 2024).
A14	Citta Nadya Celine Wurara, Stefanus Sampe, Donald K. Monintja, Michael Mamentu,	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tomohon	Efektivitas aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan di Kota Tomohon, aplikasi ini dinilai inovatif dan mampu meningkatkan efisiensi penyusunan perencanaan karena berbasis elektronik dan

		<p>terintegrasi dengan pusat dan daerah. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti belum terpenuhinya indikator-indikator efektivitas akibat dasar hukum yang sering berubah, kurangnya sosialisasi dan pelatihan rutin bagi sumber daya manusia,</p>
--	--	---

		<p>serta keterbatasan sarana prasarana. Aplikasi ini meskipun sangat membantu dibandingkan metode manual, masih membutuhkan penyesuaian dan dukungan yang lebih baik agar dapat mencapai efektivitas optimal sesuai teori Duncan dalam Steers (2012) (Wurara</p>
--	--	--

			et al., 2024).
A1 5	Kadek Prawira Wahyudi, Marja Sinurat, Arina Romarina, Ayu Widowati Johannes	Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Gianyar	Berdasarkan teori DeLone dan McLean dengan enam elemen kunci, proses optimalisasi penerapan Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gianyar belum terlaksana dengan optimal, hal ini didasarkan pada dimensi yaitu kualitas sistem dan

			<p>pelayanan yang menyangkut permasalahan <i>trouble</i> aplikasi yang terjadi pada pelaksanaan dari SIPD, selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu untuk mengelola sistem tersebut turut menjadikan penggunaannya pelayanan SIPD menjadi</p>
--	--	--	--

			kurang optimal (Wahyudi et al., 2024).
A1 6	Salmah Suprapti, Rahmi Widyanti, Kurniaty	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Realisasi Anggaran (Studi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan)	Perencanaan anggaran, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap tingkat realisasi anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

			an Selatan (Suprapti et al., 2024).
A1 7	Stevanus	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor	Penerapan SIPD telah dilaksanakan dengan baik oleh BPKAD Kabupaten Biak Numfor tetapi dari teori Sistem Informasi Manajemen menurut Laudon-Laudon dapat dilihat bahwa ada beberapa dimensi yang perlu ditingkatk

			<p>an kembali atau diperiki yaitu pada dimensi keahlian, teknologi, dan organisasi yang mana perlunya diatur kembali oleh Kabupaten Biak Numfor mengenai penggunaan SIPD serta kebutuhan SDM dalam mengelola SIPD (Stevanus, 2024).</p>
A18	M Faturrahman,	Implementasi Kebijakan Sistem	Implementasi kebijakan

	Raniasa Putra, Akhmad Mustain	Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Ilir	<p>SIPD di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir telah dimulai tetapi belum sepenuhnya optimal. Berbagai kendala teknis dan kelembagaan menjadi penghambat utama dalam proses implementasi. Terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah kepatuhan terhadap</p>
--	-------------------------------	--	--

		<p>prosedur teknis, kelancaran pelaksanaan fungsi rutin, dan pencapaian kinerja yang diinginkan. Selain itu, faktor-faktor pendukung seperti kebijakan pemerintah pusat dan komitmen internal Bappeda memberikan peluang untuk memperkuat implementasi SIPD ke</p>
--	--	--

			<p>depannya (Faturrahman et al, 2024).</p>
A19	Wisnu Jabarul Hakim	<p>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku</p>	<p>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Ambon telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Penggunaan SIPD memfasilitasi pemantauan dan evaluasi keuangan</p>

			<p>secara <i>real-time</i>, serta menyediakan informasi yang komprehensif. Namun, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitasnya, termasuk tantangan dalam dimensi organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian (Hakim, 2024).</p>
A20	Dian Praharani	Model Root	penerapan SIPD

	<p>ngtyas, Fatchan Achyani, Triyono</p>	<p>Cause Analysis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri)</p>	<p>dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri ternyata masih kurang optimal, terdapat beberapa kendala yang menghambat yang ditemui di antaranya pemerintah pusat maupun daerah kurang memberikan sosialisasi dan juga</p>
--	---	--	--

			pelatihan khusus kepada operator SIPD, aplikasi yang rumit, jaringan internet yang kurang memadai sehingga sering terjadi error, sumber daya manusia yang kurang kompeten karena keterbatasan an pegawai yang dimiliki terkadang terjadi kesalahan input data
--	--	--	---

			karena kekurangt ahuan mereka dalam alur akuntansi sehingga banyak pekerjaan dan proses penginput an lainnya mengalami keterlamb atan yang sebenarnya sangat disayangk an (Dian Praharani ngtyas, Fatchan Achyani, 2024).
--	--	--	---

Pembahasan

Berdasarkan pengkajian studi literatur, penerapan SIPD di berbagai daerah dianalisis berdasarkan teori Duncan efektivitas layanan dilihat dari enam komponen yaitu pencapaian tujuan,

integrasi, dan adaptasi, serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.

1) Pencapaian Tujuan

Dalam menguji komponen pencapaian tujuan pada pelaksanaan penerapan SIPD dalam dilihat dari subkomponen jangka waktu pencapaian, sasaran, dan landasan hukum. Jangka waktu pencapaian penerapan SIPD pada daerah dilihat dari mekanisme proses bisnis sistem, aplikasi mengusung asas efisiensi sehingga ketercapaian waktu merupakan keunggulan dari sistem ini hal ini disebutkan dalam artikel penelitian A2, A10, dan A14. Demikian halnya dalam pencapaian sasaran hasil disebutkan pada artikel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A19. Pada subkomponen pencapaian sasaran tersebut disebutkan bahwa SIPD berperan penting sebagai sarana untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi pemerintahan daerah adalah akurat, relevan, transparan, dan akuntabel. Sedangkan pada artikel lainnya, ketercapaian sasaran ini masih belum optimal karena kendala-kendala yang menyertai. Pada subkomponen landasan hukum, terdapat landasan hukum pelaksanaan SIPD yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang mewajibkan penyediaan informasi pemerintahan

daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah. SP pada artikel A2 dan A6, persoalan regulasi ini dinyatakan sudah sesuai karena merujuk langsung pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun demikian dalam artikel ilmiah yang dipublikasi A4 dan A18, disebutkan bahwa belum terdapat prosedur kerja yang secara teknis mengatur mekanisme penggunaan SIPD di perangkat daerah di Pemerintahan daerah. Selain itu, pada A14, disebutkan bahwa pada penerapan SIPD di Kota Tomohon justru ketidakefektivan terjadi akibat sering bergantinya dasar hukum.

2) Integrasi

Penerapan SIPD pada pemerintahan daerah di Indonesia, apabila dilihat dari komponen integrasi, dapat dibagi dalam

dua subkomponen yaitu prosedur dan proses sosial. Prosedur adalah langkah-langkah penyelesaian suatu kegiatan, sedangkan proses sosial adalah sarana yang menghubungkan orang dan kelompok dan bagaimana mereka berinteraksi untuk membentuk sistem tertentu. Pada artikel A4 A18 disebutkan terkait prosedur kerja yang belum tersedia sehingga secara teknis menjadi salah satu kendala pelaksana. Namun demikian pada artikel lainnya tidak disebutkan sebagai suatu kendala. Pada komponen integrasi dilihat dari proses sosial yang diindikasikan dengan konektivitas antara pihak pemangku kepentingan yang disebutkan pada artikel A4 bahwa diperlukan upaya untuk memastikan keberlanjutan implementasi aplikasi SIPD dengan tetap melakukan koordinasi antara dinas terkait untuk memastikan SIPD berjalan dengan lancar. Misalnya koordinasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai user terhadap perangkat daerah pengampu bidang perencanaan dan pelaporan, perangkat daerah yang membidangi fungsi pengelolaan keuangan, serta perangkat daerah yang membidangi fungsi informatika. Namun demikian, terdapat juga kondisi sebaliknya yang secara eksplisit disebutkan pada artikel A7 bahwa penerapan SIPD di Kabupaten Konawe telah melibatkan tiga aspek yaitu

meningkatkan motivasi pegawai, meningkatkan fokus pada pelayanan, dan meningkatkan koordinasi penyampaian layanan.

Pada proses sosial ini melihat bagaimana keterkaitan para pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dalam penerapan SIPD, apakah berjalan dengan baik mendukung efektivitas penggunaan aplikasi atau sebaliknya. Proses sosial ini juga melihat seberapa besar komitmen pimpinan dalam penerapan SIPD. Pada artikel A8 dan A18 menyebutkan pimpinan yang tidak berkomitmen dalam penerapan SIPD berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SIPD di pemerintahan daerahnya masing-masing.

3) Adaptasi

Adaptasi dalam penerapan SIPD dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas person/pelaksana. Dalam penerapan *e-government* keberadaan internet dan perangkat komputer/laptop adalah hal utama yang harus tersedia. Sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana menjadi persoalan yang juga sering disebutkan dalam artikel yang penulis kaji, terutama permasalahan akses internet yang lambat, *error system* akibat server yang tidak kuat sehingga membuat tertundanya pekerjaan, minimnya ketersediaan perangkat keras

pendukung penerapan SIPD, serta termasuk kemampuan sistem dalam mengakomodasi proses bisnis yang selama ini berjalan. Hal ini disebutkan pada artikel A2, A3, A5, A9, A10, A11, A12, A14, A15, A17, A19, dan A20. Secara khusus disebutkan pada artikel A3 dan A5 bahwa pada SIPD belum tersedia fitur untuk aset serta lainnya, sehingga sebagian proses bisnis masih dilaksanakan secara tidak terintegrasi dalam satu sistem, SIPD. Selain itu, terjadi data yang tidak terintegrasi sehingga kesulitan dalam penarikan data dalam sistem.

Adapun pada subkomponen lainnya yakni peningkatan kapasitas, disebutkan pada artikel A1, A5, A10, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A19, A20 bahwa kendala adaptasi dengan sistem masih dinilai kurang karena masih proses transisi budaya dari pengelolaan perencanaan sampai dengan pelaporan secara manual berubah menjadi digital. Kondisi ini semakin terkendala dengan operator SIPD yang belum memiliki pemahaman yang merata untuk mengoperasikan SIPD. Kekurangtahuan mereka dalam proses bisnis akuntansi maupun pengoperasian SIPD sehingga banyak pekerjaan dan proses penginputan lainnya mengalami keterlambatan.

Berdasarkan artikel yang sudah dikaji, faktor-faktor yang menghambat

penerapan SIPD di pemerintahan daerah di Indonesia yaitu:

- 1) Minimnya pemahaman pelaksana terhadap pengoperasian aplikasi

Penerapan SIPD di pemerintahan daerah di Indonesia merupakan hal yang relatif baru. Budaya kerja yang terbiasa manual perlu beradaptasi mengarah pada proses digital. Dengan demikian diperlukan pemahaman yang mendalam bagi pelaksana/operatir untuk menjalankannya. Pemahaman terhadap pengoperasian aplikasi yang terjadi di beberapa daerah masih belum merata. Hal ini disebabkan minimnya pelatihan yang mereka dapatkan. Perlu pembiasaan bagi operator dengan pendampingan *heldesk* yang disiapkan oleh masing-masing pemerintahan daerah untuk mengatasi *gap* pemahaman tersebut. Dengan demikian kendala yang ditemukan di lapangan, yang terkait ketidaktahuan operatir bisa dipandu oleh pendamping sehingga penggunaan aplikasi bisa kembali berjalan. Permasalahan ini banyak disebutkan pada artikel A1, A5, A12, A14, A20.

- 2) Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana

Sebagaimana disebutkan juga pada komponen adaptasi bahwa persoalan ini adalah kendala sering disebutkan dalam beberapa artikel A1, A5, A12, A14, A20. Transisi budaya kerja dari manual ke

digital, salah satu faktor penentu keberhasilannya adalah pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menunjang beroperasinya aplikasi secara baik. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut meliputi: server yang tidak cukup kuat sehingga sering terjadi *error system*, internet yang tidak stabil, minimnya ketersediaan perangkat keras pendukung penerapan SIPD, serta termasuk kemampuan sistem dalam mengakomodasi proses bisnis yang selama ini berjalan.

3) Rendahnya komitmen pimpinan

Terlaksananya transformasi digital dipengaruhi oleh komitmen pimpinan. Rendahnya komitmen pimpinan untuk menerapkan SIPD pada perangkat daerahnya, terlebih lagi pimpinan tertinggi wilayah, yakni kepala daerah, berdampak pada lambannya efektivitas penerapan sistem tersebut. Hal ini disebutkan pada artikel kode A8.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pemerintahan daerah di Indonesia dilihat dari teori Duncan berdasarkan komponen pencapaian tujuan dan integrasi sudah efektif, tetapi pada komponen adaptasi masih

belum dinilai efektif pelaksanaannya karena terdapat kendala-kendala dalam ketersediaan sumber daya.

2. Faktor-faktor penghambat efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pemerintahan daerah di Indonesia yaitu: minimnya pemahaman pelaksana terhadap pengoperasian aplikasi, keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana, dan rendahnya komitmen pimpinan.

Saran

Berdasarkan faktor-faktor penghambat penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pemerintahan daerah di Indonesia berikut rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu:

1. Pemerintah daerah agar meningkatkan pemahaman operator melalui peningkatan pelatihan serta pendampingan dari perangkat daerah yang ditunjuk memotori penerapan SIPD.
2. Pemerintah daerah perlu menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pengoperasian SIPD yaitu penguatan jaringan internet dan penyediaan perangkat keras. Selain itu, mengoordinasikan kepada Kementerian Dalam Negeri RI berkenaan dengan kemampuan

server yang lebih memadai serta fitur yang lebih lengkap sesuai proses bisnis.

3. Kementerian Dalam Negeri agar meningkatkan komitmen pimpinan pemerintah daerah melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, N. Y., Dian, P., & Kusuma, I. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Perkembangan zaman digital saat ini mendorong Kementrian Dalam Negeri dan Salah satu faktor yang meningkatkan efiseinsi penginputan perencanaan dan keuangan oleh Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah adopsi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini terjadi seiring dengan diberlakukannya.* 12(1).
- Alani, A. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Aplikasi Akuntansi dalam Proses Akuntansi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (Studi Kasus pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat). In *Αγαη*.
- Amroni, R. Z., & Taufan, T. (2024). Penerapan Pengawasan Terhadap Penerapan Aplikasi SIPD Di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 1–14. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD>
- Asmawati, N., Suparman, S., & Gunawan, H. (2024). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1308–1314. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3376>
- Ayomi, N. G. (2024). *Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.* 1–23.
- Bell, D. (2004). *Cyberculture The Key Concepts.* Routledge.
- Destania, S. (2024). *Evaluasi Kualitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun* (Vol. 11, Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.reg>

- sciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Dian Praharaningtyas, Fatchan Achyani, T. (2024). *Model Root Cause Analysis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri)*. 1–14. <https://eds.p.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=376d4fe2-d423-4b1e-935e-500f705c7da2%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3D#AN=109057127&db=ers>
- Gibson. (2001). *No Title Organisasi Perilaku-Struktur Proses*. Erlangga.
- Hakim, W. J. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Holmes, D. (2001). *E Gov E-Business Strategies for Government*. Brealey Publishing.
- Jeong, K.-H. (2006). *The Road to Innovation, E-government Principles and Experiences in Korea*. Gil-Job-E-Media.
- Lazuardi, A., & Pawestri, H. P. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. 13(3), 582–595.
- M. Zed. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mariana, L. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. 11(2), 123–130.
- Moenir, H. A. S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Pratami, F. (2024). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Rahman, B., & Selviyanti, E. (2018). Studi

- Literatur : Peran Stratifikasi Sosial Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman. *Jurnal Planologi*, 15(2), 195–215. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3525>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV Natakarya.
- Subroto, I., & A. A. Uliansyah, B. (2024). Evaluasi Perspektif Pengguna Terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten X). *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(2), 140–157. <https://doi.org/10.31092/jmkip.v7i2.2578>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sukmawaty, Gunawan, M. Y. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah*. 15(1), 98–108.
- Suprpti, S., Widyanti, R., & Kurniaty. (2024). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Realisasi Anggaran (Studi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan)*.
- Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2024). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar*. Penulis : Afiliasi : Email : 4(2), 111–123.
- Wahyudi, K. P., Johannes, A. W., Sinurat, M., & Romarina, A. (2024). Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Gianyar. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 11(1), 27–38. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4381>
- Wurara, C. N. C., Stefanus Sampe, Donald K. Monintja, Michael Mamentu, Fanley N. Pangemanan, & Steeva G. Rondonuwu. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Tomohon. *Journal Publicuho*, 7(2), 802–810. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436>.